JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

Konsolidasi Politik Gerakan Buruh Pada Pemilu 2024 di Tengah Lanskap Industri Kabupaten Bekasi

Lalu Agsal Fazalani[1], Aditya Perdana[2]
Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia[1 2]
fazalani77@gmail.com[1], adperd@gmail.com[2]

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsolidasi politik gerakan buruh di Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Adapun penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menggunakan pendekatan geografi tenaga kerja yang dikemukakan oleh Andrew Herod untuk menganalisis politik perburuhan di Indonesia. Konsentrasi geografis kawasan industri menjadi faktor penting yang membentuk pola interaksi sosial, solidaritas gerakan, dan kemampuan mobilisasi gerakan buruh. Pendekatan ini memposisikan buruh sebagai agen aktif yang turut serta berperan dalam menciptakan geografis mereka sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus Gerakan Buruh di Kabupaten Bekasi dalam konteks Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari anggota serikat buruh dan Partai Buruh, serta melalui data sekunder seperti dokumen dan literatur terkait. Temuan studi ini menunjukkan bahwa gerakan buruh di Kabupaten Bekasi berhasil memanfaatkan aspek spasial dan lanskap politik yang telah terbentuk sedemikian rupa untuk memengaruhi konsolidasi politik elektoral. Meskipun demikian terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh gerakan buruh dalam melakukan konsolidasi politik, terutama yang berkaitan untuk tujuan politik elektoral.

Kata kunci: Geografi Tenaga Kerja, Konsolidasi Politik, Gerakan Buruh

ABSTRACT: This study aims to examine the political consolidation of the labor movement in Bekasi Regency during the 2024 elections. This study offers a new perspective by using the labor geography approach proposed by Andrew Herod to analyze labor politics in Indonesia. The geographical concentration of industrial areas is an important factor that shapes social interaction patterns, movement solidarity, and the mobilization capabilities of labor movements. This approach positions workers as active agents who participate in creating their own geography with the aim of fulfilling their economic and political interests. The method used in this study is qualitative, with a case study of the Labor Movement in Bekasi Regency in the context of the 2024 elections. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants from labor unions and the Labor Party, as well as through secondary data such as relevant documents and literature. The findings of this study show that the labor movement in Bekasi Regency has successfully utilized the spatial aspects and political landscape that have been formed in such a way as to influence electoral political consolidation. However, there are various challenges that the labor movement must face in carrying out political consolidation, especially those related to electoral political objectives.

Keywords: Labor Geography, Political Consolidation, Labor Movements

PENDAHULUAN

Gerakan buruh memiliki peranan yang sangat penting dalam mewarnai perpolitikan di Indonesia. Peran gerakan ini sudah berlangsung sejak lama. Pada

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

masa awal-awal kemerdekaan gerakan buruh memiliki hubungan erat dengan partai politik dan bahkan menjadi underbow dari partai politik. Sebab itu, gerakan buruh juga memberikan kontribusi yang besar terhadap situasi sosial dan politik pada saat itu (Randi & Prayogi, 2022). Gerakan buruh turut serta berperan aktif dalam membela, mempertahankan, bahkan mengisi kemerdekaan Indonesia (Sulistyo, 2018). Meskipun demikian, posisi tawar buruh mulai surut pada era Orde Baru. Buruh tidak berdaya lagi secara politik disebabkan oleh represi dan kooptasi oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu (Winters et al., 2000). Dan pada era Reformasi gerakan buruh kembali lagi menemukan posisi tawarnya dengan dibukanya kran kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat di tempat umum (Suryomenggolo, 2018).

Dengan adanya kebebasan untuk berserikat pada era Reformasi, gerakan buruh telah melakukan berbagai aksi jalanan untuk memprotes pemilik modal dan pemerintah. Aksi jalanan yang dimaksud mengacu pada serangkaian aksi demonstrasi, mogok kerja, longmarch dan sebagainya yang bertujuan untuk menuntut perubahan kebijakan publik terkait ketenagakerjaan (Juliawan, 2011). Namun, dewasa ini gerakan buruh di Indonesia tidak hanya melakukan serangkaian aksi jalanan. Gerakan buruh saat ini mulai bertransformasi ke ranah yang lebih progresif yaitu mengarah kepada isu-isu politik. Salah satunya ialah mengenai kesadaran buruh untuk terjun ke dalam arena politik elektoral (Caraway et al., 2015). Gerakan buruh menggunakan arena politik elektoral sebagai sarana untuk memperjuagkan kepentingan buruh.

Terbentuknya sebuah gerakan sosial, dalam hal ini gerakan buruh dikarenakan adanya proses dialektika dalam sebuah ruang yang melibatkan buruh, pemilik modal, dan negara. Dialektika ini tidak terjadi semata-mata dalam sebuah ruang hampa. Hal ini terjadi melainkan dalam sebuah ruang spasial yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh ekonomi kapitalisme. Ruang spasial yang telah terbentuk tersebut kemudian memunculkan pertentangan antara kelompok kapital dan kelompok buruh. Oleh karena itu, ruang memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ruang menjadi wadah bagi kehidupan manusia yang memiliki fungsi dasar untuk mengakomodir aktivitas penghuninya (Mauritz O. Pangkerego, 2013). Pemahaman terhadap ruang tidak dapat dipisahkan tanpa melihat manusia yang hidup di dalamnya.

Lefebvre (1991) dalam bukunya “The Production of Space” mengungkapkan bahwa ruang bukanlah sebuah wadah pasif tempat di mana kehidupan sosial berlangsung. Sebaliknya, ruang secara aktif diproduksi melalui hubungan dan proses sosial. Pandangan ini berangkat dari paradigma aliran Neo-Marxis dalam memandang hubungan ruang dan masyarakat yang saling terkait satu sama lain. Adapun Herod, dalam menjelaskan hubungan antara ruang dan masyarakat ini,

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

menggunakan sebuah pendekatan baru yaitu pendekatan geografi tenaga kerja. Herod menyebutkan bahwa geografi tenaga kerja menyatakan bahwa ruang yang terbentuk saat ini dibentuk oleh masyarakat yang menetap di daerah tersebut, sementara di sisi lain masyarakat juga dibentuk oleh ruang di mana mereka hidup tersebut (Herod, 2003).

Berdasarkan pada penjelasan Herod di atas, pemahaman terhadap ruang melibatkan andil yang sangat besar dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemahaman terhadap ruang produksi. Dalam ruang produksi, buruh diposisikan sebagai agen aktif yang juga memanfaatkan ruang produksi yang ada untuk memenuhi keperluan ekonomi maupun keperluan politik mereka (Herod, 2003). Ruang produksi yang telah terbentuk melalui proses dialektika tersebut menjadi wadah bagi buruh untuk mengaktualisasikan diri mereka dengan berbagai macam bentuk. Posisi geografis dari kawasan industri di suatu daerah secara tidak langsung turut serta memengaruhi pola perilaku buruh yang bekerja dan menetap di daerah tersebut. Buruh yang berada di suatu daerah industri menghimpun kekuatan agar dapat memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait (Herod, 2001).

Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan teori geografi tenaga kerja yang dikembangkan oleh Andrew Herod. Herod memandang bahwa buruh bukanlah sebagai agen pasif dalam ruang lingkup spasial ekonomi kapitalisme. Namun, dalam hal ini buruh justru diposisikan sebagai agen aktif yang turut serta membentuk ruang geografis itu sendiri. Berdasarkan praktiknya studi ini lebih berfokus pada aktivitas buruh yang tergabung dalam serikat. Oleh karena itu, mengenai bagaimana serikat dapat dipahami dalam disiplin geografi setidaknya terdapat 4 fokus utama yang saling berkaitan. Keempat hal tersebut melingkupi; (1) pengaruh regulasi negara terhadap aspek spasial perburuhan; (2) peran serikat buruh dalam membentuk lanskap ekonomi; (3) dampak faktor spasial terhadap geografi politik serikat buruh; dan (4) pengaruh kekhasan tempat terhadap karakter serikat buruh (Herod, 2020).

> *"In terms of how the study of unions has been articulated within geography there are, at least, four (overlapping) areas of focus: i) how labor law and state regulation in uence the spatial structure of unionism; ii) how unions and other workers' organizations have shaped economic landscapes; iii) how spatial concerns affect the political geography of labor organizing; and iv) how the particularities of place impact the nature of unionism",* (Herod, 2020, p. 72).

Adapun secara umum, ruang lingkup penelitian ini berfokus untuk mengkaji sejauh mana posisi geografis dari suatu kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi berimplikasi pada gerakan politik serikat buruh. Terlebih khusus mengenai bagaimana mereka melakukan konsolidasi politik gerakan untuk memilih Partai Buruh pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Kabupaten Bekasi

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena daerah ini merupakan pusat kawasan industri, dengan jumlah dan skala kawasan industri terbesar di Indonesia yang mencapai angka 7.500 pabrik (menurut data pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2023) dan tersebar di 11 titik kawasan industri (Iskandar, 2023; Kumparan.com, 2023). Pemahaman mengenai bagaimana ruang dapat membentuk kekuatan yang mendorong atau membatasi tindakan sosial antara pekerja dan kapitalis menegaskan bahwa pembentukan kelas sosial dan politik kelas pada dasarnya bersifat geografis (Herod, 2001). Maka dari itu aspek ruang ini tidak bisa dilepaskan untuk memahami pola perilaku politik buruh yang menetap dan bekerja di suatu kawasan industri tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada deskripsi dan analisa mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh terkait topik penelitian. Menurut Creswell (2014) pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menyelidiki fenomena sosial atau permasalahan manusia berdasarkan metodologi tertentu. Dalam konteks ilmu politik, metode ini berfokus pada penjelasan berbasis teks, pengalaman pribadi, dan refleksi yang berkaitan dengan lembaga, peristiwa, atau proses politik (Lowndes et al., 2017). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, khususnya terkait representasi politik kelas pekerja melalui Partai Buruh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai fitur dari satu atau beberapa kasus yang menjadi fokus penelitian (Neuman, 2014). Kasus-kasus ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, gerakan, peristiwa, atau wilayah geografis tertentu. Studi kasus memberikan data yang rinci, luas, dan terfokus pada durasi tertentu, serta memungkinkan pemahaman mendalam berdasarkan narasumber atau konteks yang melatarbelakanginya (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, studi kasus diarahkan untuk menelaah konsolidasi politik gerakan Buruh di Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024 melalui pendekatan geografi tenaga kerja. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui melalui observasi, wawancara tidak terstruktur maupun semi-terstruktur, dokumen, dan materi visual, yang dicatat secara sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait topik penelitian, untuk memastikan akurasi informasi di lapangan. Sedangkan data sekunder berfungsi melengkapi data primer dan dapat diperoleh dari buku, jurnal,

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

surat kabar, dokumen resmi, materi audio visual, media sosial, dan sumber lain yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi komprehensif terkait masalah penelitian dan membangun pemahaman yang utuh mengenai aspek geografis perburuhan dan dinamika politik perburuhan di Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Terbentuknya Spasial Perburuhan di Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah pusat kawasan industri di Indonesia. Tercatat, pada tahun 2023 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, jumlah pabrik yang ada di daerah ini berjumlah 7.500 pabrik (Iskandar, 2023). Jumlah tersebut merupakan angka yang paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang menjadi pusat industri lainnya. Perbandingan jumlah pabrik di daerah ini jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pabrik di Daerah-Daerah Industri di Indonesia

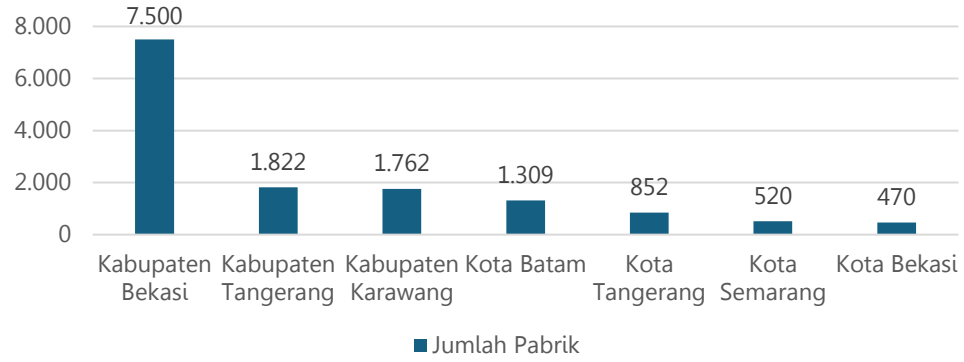

Sumber: Diolah oleh peneliti dan dihimpun dari berbagai sumber terkait.

Jika ditinjau pada tabel di atas, Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang memiliki pabrik terbanyak di Indonesia. Pabrik-pabrik tersebut tersebar di 11 kawasan industri yang ada di daerah ini. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Colliers Indonesia menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi berkontribusi sebesar 41% terhadap total luas lahan kawasan industri yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang mencapai luas lahan sebesar 17.522 hektare (Sugianto, 2025). Jumlah pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi ini berimplikasi pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat, pada tahun 2022 Kabupaten Bekasi memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 445.951

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

tenaga kerja (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024). Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Bekasi sebagai pusat daripada kawasan industri di Indonesia tidak semata-mata terjadi begitu saja. Hal ini tidak terlepas dari konteks historis mengenai desain dan pengembangan Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. Pengembangan kawasan industri di daerah ini bermula dari ditunjuknya wilayah Cikarang sebagai cikal bakal berdirinya kawasan industri di Kabupaten Bekasi pada tahun 1982 (Rohmah, 2018).

Sulaeman dkk menjelaskan bahwa wilayah Cikarang yang saat ini merupakan pusat kawasan industri di Kabupaten Bekasi, dahulunya justru didominasi oleh sektor pertanian pada era kolonial. Sekitar tahun 1850-an wilayah ini menjadi produsen beras dan juga menjadi salah satu pusat perdagangan penting. Beras-beras yang diproduksi di Cikarang ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan di Batavia pada saat itu. Namun, petani di daerah ini tidak dapat menghindar dari dinamika perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini, sektor pertanian dihadapkan pada dua tuntutan yang saling bertentangan. Di satu sisi, sektor pertanian diharuskan untuk meningkatkan produktivitasnya, sementara di sisi lain, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian harus menurun seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya, khususnya sektor industri (Sulaeman et al., 2024).

Sejarah masuknya industrialisasi di Cikarang memiliki kaitan erat dengan kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada era Orde Baru. Pada era itu, Indonesia mengalami transformasi ekonomi yang signifikan dari negara agraris menjadi negara yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. Pembangunan sektor industri di Cikarang ini dimulai sejak tahun 1970-an yang ditandai dengan adanya kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru melalui UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Sulaeman et al., 2024). Pemilihan wilayah Cikarang sebagai pusat kawasan industri di Kabupaten Bekasi merupakan wujud konkret dari penataan ruang di daerah ini untuk pemukiman buruh dan kawasan industri. Hal ini dikarenakan wilayah Cikarang pada saat itu memiliki lahan yang luas dan dekat dengan ibukota Jakarta sehingga memudahkan untuk memasok produksi hasil industri.

Regulasi PMA menjadi pembuka jalan masuknya para investor asing untuk menanam modal di Kabupaten Bekasi. Seiring dengan bertambahnya jumlah industri dan dengan adanya akses yang baik terhadap kawasan industri telah menarik minat para pekerja migran untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka ke daerah ini (Irawati et al., 2016). Tumbuh pesatnya kawasan industri Kabupaten Bekasi kemudian juga menjadi faktor penyebab tumbuhnya hunian buruh. Alih

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

fungsi lahan di Kabupaten Bekasi tidak hanya difokuskan pada pembangunan kawasan industri, tetapi juga pada penyediaan perumahan bagi para buruh yang terus berdatangan melalui arus migrasi (Sulaeman et al., 2024).

Hal di atas mendorong peningkatan terhadap kepadatan penduduk dan kebutuhan hunian di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, laju pertumbuhan penduduk periode 2020–2024 mencapai 1,85% (BPS Kabupaten Bekasi, 2025), angka yang diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pabrik baru. Pertumbuhan jumlah pabrik di daerah ini secara langsung berimplikasi pada peningkatan kepadatan penduduk, menjadikan Kabupaten Bekasi tidak hanya sebagai daerah pusat kawasan industri, tetapi juga sebagai wilayah urban padat dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dikarenakan terus datangnya buruh yang berasal dari daerah dan latar belakang yang berbeda ke daerah ini.

Sebagian besar buruh yang berasal dari luar daerah dan memutuskan untuk menetap di Kabupaten Bekasi memilih untuk tinggal di perumahan yang berdekatan dengan pabrik tempat mereka bekerja. Mayoritas buruh yang ada di Kabupaten Bekasi memilih untuk tinggal di perumahan-perumahan yang berdekatan dengan kawasan industri dan hanya sebagian saja yang masih tinggal di wilayah pedesaan. “Hanya berapa persen saja buruh di Kabupaten Bekasi ini yang tinggal di luar perumahan”, ujar Hidayah (Koordinator Omah Buruh, wawancara 1/10/2025).

Gambar 1. Potret pembangunan hunian buruh yang bersebelahan langsung dengan pabrik
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025).

Kedekatan tempat tinggal buruh dengan lokasi pabrik menciptakan efisiensi mobilitas sekaligus mempermudah koordinasi dalam menjalankan berbagai agenda yang berkaitan dengan isu perburuhan. Kondisi spasial yang terbentuk ini kemudian juga memengaruhi lanskap politik perburuhan yang ada di Kabupaten Bekasi.

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

Kedekatan geografis antara tempat tinggal dan tempat kerja dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan solidaritas buruh. Dalam konteks ini, para buruh kemudian menginisiasi pembentukan forum kawasan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas kawasan industri, yang berfungsi memperkuat kohesi sosial sekaligus kapasitas kolektif gerakan buruh di tingkat lokal.

2. Lanskap Politik Kabupaten Bekasi Sebagai Daerah Kawasan Industri

Langkah-langkah yang selama ini dilakukan oleh gerakan buruh di Kabupaten Bekasi telah membentuk lanskap politik di daerah ini, terutama di area perkotaan. Lanskap politik yang dimaksud mengacu kepada kehidupan sosial yang telah terbentuk melalui proses politik, ekonomi, dan relasi kekuasaan yang berkembang di daerah ini. Lanskap politik yang telah terbentuk ini kemudian juga turut memengaruhi dan membentuk perilaku politik gerakan buruh, dengan kata lain buruh yang terlibat dalam gerakan sosial-politik di Kabupaten Bekasi telah membentuk dan dibentuk oleh spasialitas mereka sendiri. Meskipun pemilik modal membentuk geografi tenaga kerja dan menentukan lokasi dari sebuah kawasan industri, namun buruh juga merupakan aktor penting dalam pembentukan geografi tersebut (Herod, 2023).

Peran buruh dalam membentuk lanskap politik di daerah ini tercermin dalam berbagai agenda aksi yang dilakukan oleh gerakan buruh. Aksi-aksi seperti mogok kerja, grebek pabrik, demonstrasi, dan sebagainya ialah merupakan bentuk dialektis dari pertentangan antara buruh, pemilik modal, dan negara. Dialektika yang terjadi antara berbagai pihak ini kemudian menghasilkan kebijakan yang mengakomodir semua pihak. Tak cukup sampai disitu, aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan buruh ini menjadi penentu nilai tawar buruh dalam penguasaan atas ruang. Dalam hal ini ruang tidak hanya mengacu kepada bentuk tempat semata, namun ruang juga mengacu pada kesempatan maupun akses yang dimiliki oleh buruh dalam memengaruhi lanskap politik.

Buruh menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika sosial-politik di suatu daerah. Di Kabupaten Bekasi, buruh selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan buruh di Kabupaten Bekasi telah melakukan serangkaian aksi sebagai bentuk tuntutan terhadap pemilik modal dan negara.

Beberapa bentuk aksi yang dilakukan oleh gerakan buruh di Kabupaten Bekasi biasanya berfokus pada isu ketenagakerjaan. Pada tahun 2012 gerakan buruh di Kabupaten Bekasi melakukan aksi ‘grebek pabrik’ atau solidaritas antar pabrik. Aksi grebek pabrik dilakukan dengan cara mogok kerja di pabrik dan pendudukan

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

pabrik oleh serikat buruh. Aksi ini bertujuan untuk membela hak-hak buruh yang selama ini mandek untuk diselesaikan melalui saluran resmi (Mufakhir, 2014). Selain itu, baru-baru ini pada bulan September 2025 gerakan buruh di Kabupaten Bekasi kembali melakukan aksi di depan gedung Bupati Kabupaten Bekasi. Dalam aksi yang tergabung dalam aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM), terdapat beberapa tuntutan yang digaungkan oleh gerakan buruh salah satunya ialah untuk menuntut Kenaikan Upah Minimum (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 sebesar 10,5% hingga 15% (SPSI Bekasi, 2025).

Gambar 2. Aksi Longmarch yang Dilakukan Oleh Buruh Bekasi Melawan (BBM) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025).

Serangkaian aksi yang dilakukan oleh buruh merupakan langkah yang mereka tempuh untuk memenuhi kepentingan politik mereka. Selain itu, peran aktif buruh dalam dinamika politik di suatu daerah memberikan sumbangsih mendalam terhadap pemaknaan terhadap ruang bagi buruh itu sendiri dan telah membentuk solidaritas buruh di Kabupaten Bekasi. Bagi buruh di Kabupaten Bekasi, ruang maupun posisi geografis yang mereka tempati saat ini merupakan bentuk dari perwujudan dari perjuangan yang telah lama mereka lakukan.

Kemampuan untuk membentuk lanskap politik dengan cara tertentu memiliki implikasi yang signifikan bagi keseimbangan kekuatan politik antara berbagai kelompok sosial. Hal tersebut dapat memainkan peran sentral dalam perjuangan politik (Herod, 2001). Dalam hal ini buruh dan pemilik modal diposisikan setara dan memiliki hak yang sama untuk merumuskan kebijakan publik.

Aksi-aksi buruh ini menjadi landasan bahwa mereka juga memiliki peranan penting untuk mengaktualisasikan diri dan memaknai ruang yang mereka tempati saat ini. Pemaknaan terhadap ruang pada dasarnya hanya bisa dilakukan dengan turut serta memaknai manusia yang hidup di dalam ruang tersebut, termasuk dalam memaknai ruang perburuhan. Hal ini menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Keterlibatan buruh atas penguasaan lanskap politik di Kabupaten

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

Bekasi memunculkan peluang-peluang baru sebagai arena dalam memenuhi kepentingan ekonomi dan politik. Keterlibatan buruh dalam lanskap politik saat ini bertransformasi menjadi bentuk perjuangan dalam arena politik elektoral.

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsolidasi Politik Buruh di Kabupaten Bekasi

Keterlibatan buruh dalam arena politik di Kabupaten Bekasi menunjukkan transformasi penting dalam kesadaran kolektif kelas pekerja. Politik tidak lagi dianggap tabu, melainkan dipahami sebagai instrumen gerakan politik buruh untuk memperjuangkan kepentingan buruh di tingkat kekuasaan dan menjadi aktor dari pembuat kebijakan publik. Tampilnya buruh dalam arena politik elektoral semakin menguatkan argumen Herod mengenai buruh sebagai agen aktif dari pembentukan lanskap politik atau geografi tenaga kerja itu sendiri (Herod, 2003). Selain itu, jika melihat konteks konsolidasi politik gerakan buruh yang dilakukan oleh kelompok buruh di Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024. Maka, dapat terlihat bagaimana gerakan buruh di daerah ini telah berhasil mengonfigurasikan aspek spasial buruh dan lanskap politik yang telah terbentuk sedemikian rupa menjadi sebuah peluang dalam konteks politik elektoral.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam menguatnya gerakan go politics[1] yang berhasil mendorong sejumlah perwakilan buruh untuk duduk di parlemen daerah hingga tingkat nasional. Kesadaran buruh untuk terlibat aktif dalam arena politik elektoral lahir dari refleksi panjang atas keterbatasan gerakan mereka selama ini dalam memengaruhi kebijakan publik (Savirani, 2022). Adapun dalam membahas persoalan mengenai politik elektoral buruh di Kabupaten Bekasi, maka sudah sepatutnya kita membahas Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Federasi tersebut merupakan federasi buruh di Kabupaten Bekasi yang paling menonjol dalam mendukung politik buruh dan memiliki keanggotaan yang besar.

Savirani menjelaskan bahwa keterlibatan serikat buruh seperti FSPMI dalam politik elektoral didorong oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran buruh akan kekuatan kolektif mereka sebagai basis massa strategis dalam Pemilu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tiga hal: pertama, perilaku partai politik yang berusaha merekrut suara buruh demi kemenangan elektoral; kedua, pembatasan ruang gerak aksi-aksi industrial yang dianggap mengganggu stabilitas ekonomi; dan ketiga, mekanisme negosiasi upah yang kerap mengecualikan perwakilan buruh. Faktor-faktor tersebut

[1] *Go politics* ialah sebuah gerakan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung kader-kader mereka untuk terjun dan terlibat aktif dalam arena politik elektoral.

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

kemudian menjadi pendorong bagi para aktivis buruh untuk ikut terlibat langsung dalam arena politik elektoral (Savirani, 2022).

Adapun untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat konsolidasi politik gerakan buruh di Kabupaten Bekasi dalam konteks Pemilu 2024, temuan studi ini mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 3 faktor penting yang memengaruhi hal tersebut antara lain:

a. Pola Interaksi Antara Serikat Buruh dan Partai Buruh

Buruh-buruh di Kabupaten Bekasi pada dasarnya memiliki keterikatan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan jarak pabrik dan tempat tinggal yang berdekatan. Selain itu buruh di daerah ini juga disatukan oleh serikat buruh. Dengan adanya serikat, buruh dapat mengaktualisasikan dirinya dan mempunyai wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Serikat mempunyai peranan penting dalam mengakomodir kepentingan buruh. FSPMI sebagai sebuah federasi serikat buruh di Kabupaten Bekasi menggunakan berbagai infrastruktur yang mereka miliki untuk menyatukan suara buruh agar memilih Partai Buruh pada Pemilu 2024.

FSPMI dan Partai Buruh memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan FSPMI merupakan salah satu inisiator berdirinya kembali Partai Buruh pada tahun 2021. Begitupun yang terjadi dengan FSPMI Kabupaten Bekasi, federasi ini mendukung penuh Partai Buruh dengan mengerahkan sumberdaya yang mereka miliki. Sumber daya tersebut antara lain digunakannya Perangkat Unit Kerja (PUK) yang dibawah naungan FSPMI, penggunaan Omah Buruh, dan penggunaan kantor cabang FSPMI Kabupaten Bekasi sebagai kantor cabang Partai Buruh Kabupaten Bekasi. Dukungan yang diberikan oleh serikat buruh kepada Partai Buruh tidak hanya bersifat normatif, mereka juga mendukung penuh kerja-kerja mobilisasi dan konsolidasi politik partai.

Gambar 3. Penggunaan kantor SPMI sebagai sekretariat Partai Buruh Kabupaten Bekasi
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025).

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

Tidak cukup sampai disitu, komponen serikat buruh yang berbasis kuat di kawasan dan pabrik-pabrik juga turut digunakan untuk agenda politik oleh Partai Buruh. Forum-forum kawasan seperti Omah Buruh yang biasanya digunakan untuk konsolidasi mengenai regulasi ketenagakerjaan dan kegiatan sosial lainnya, juga digunakan sebagai arena konsolidasi politik. FSPMI memiliki pengaruh kuat dalam mengkonsolidasikan gerakan dan politik buruh di Kabupaten Bekasi."Lalu tentang kegiatan politik, ya lebih aktifnya instruksinya dari perangkat, baik itu KC (Konsulat Cabang) maupun PC (Pengurus Cabang) nya masing-masing terkait kegiatan politik biasanya", ungkap Hidayah (Koordinator Omah Buruh, wawancara 1/10/2025).

Adanya kemelekatan yang kuat antara serikat buruh dan Partai Buruh ini kemudian menciptakan identitas ganda diantara para anggota serikat maupun anggota partai. Berbeda ketika era awal-awal kemerdekaan, serikat buruh merupakan underbow dari suatu partai politik. Namun dalam konteks apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi, serikat buruh justru merupakan inisiator dan menjadi pemegang saham yang paling besar bagi suatu partai politik. "Antara serikat dan Partai Buruh nggak bisa dipisahkan", ujar Pandji Budi Santosa (Bidang advokasi Partai Buruh, wawancara 29/09/2025).

b. Solidaritas Gerakan Buruh

Solidaritas gerakan buruh di Kabupaten Bekasi menjadi fondasi penting bagi eksistensi gerakan ini. Tanpa adanya solidaritas yang tinggi dari aktivis buruh, maka agenda-agenda politik buruh akan sulit untuk dilaksanakan. Solidaritas buruh di daerah ini terbentuk karena rutinitas pertemuan yang mereka lakukan, entah pertemuan di pabrik, di medan aksi, maupun pertemuan saat konsolidasi akbar. Berbagai infrastruktur yang dimiliki oleh serikat buruh di daerah ini turut mendukung intensitas pertemuan yang dilakukan oleh buruh.

Dalam ruang lingkup pabrik, serikat buruh memiliki Perangkat Unit Kerja (PUK) yang tersebar di beberapa pabrik. PUK memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama serikat buruh di tingkat perusahaan. Selain itu, perangkat ini menjadi wadah bagi buruh untuk berserikat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satu ketua PUK mengungkapkan bahwa secara rutin PUK melakukan kegiatan seperti rapat pengurus dan anggota, pendidikan dasar keorganisasian, dan bersolidaritas membantu sesama anggota yang membutuhkan. "Agenda kita itu ya rapat pengurus, rapat korlap, sama rapat anggota. Itu rutin, paling nggak ya sebulan sekali ada. Kadang ada isu mendesak, bisa dua minggu sekali", ungkap Yayat Hidayat (Ketua PUK PT.Patec, wawancara 29/09/2025).

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

Gambar 4. Sekretariat PUK PT. Patec yang bersebelahan dengan pabrik
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025).

Adapun secara kelembagaan, PUK tidak hanya berfungsi sebagai simpul komunikasi dan konsolidasi di akar rumput, tetapi juga menjadi sumber pendanaan organisasi serikat buruh melalui iuran anggota sebesar satu persen dari gaji bulanan. Dana ini digunakan untuk kegiatan internal seperti aksi mogok, musyawarah anggota, hingga dukungan operasional untuk kampanye politik buruh. Dalam konteks Pemilu 2024, sejumlah PUK di Kabupaten Bekasi turut mengalokasikan dana yang mereka miliki untuk mendukung pendanaan Partai Buruh dan calon legislatif yang berasal dari kalangan buruh. “Bukan partai yang ngasih, bahkan kita yang ngasih ke partai (Partai Buruh) kemarin juga kalau total-total 20 juta mah ada ya... lebih malahan 30 juta ada iya uang PUK, uang anggota”, ujar Yayat Hidayat (Ketua PUK PT. Patec, wawancara 29/09/2025). Bentuk dukungan yang diberikan oleh PUK ini menjadi bantuan penting untuk membantu pembiayaan politik Partai Buruh. Hal ini pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip politik dan kebijakan serikat buruh, khususnya FSPMI di Kabupaten Bekasi yang tidak mau terlibat dalam penggunaan politik uang (money politics) (Savirani, 2022).

Dukungan yang diberikan oleh PUK ini bersifat merata, tidak hanya di salah satu PUK saja. Hal tersebut dikarenakan adanya instruksi dari konsulat cabang FSPMI Kota/Kabupaten Bekasi untuk melakukan hal tersebut. “Itu juga dari saya juga berani seperti itu karena memang dari perangkat juga ada mengajarkan (menginstruksikan) itu”, ujar Yayat Hidayat (Ketua PUK PT. Patec, wawancara 29/09/2025). Adapun jumlah dana yang dikeluarkan oleh masing-masing PUK ini pun beragam tergantung pada kapasitas sumberdaya internal yang dimiliki oleh PUK tersebut. Kapasitas finansial dan organisasi yang dimiliki PUK memperlihatkan bahwa struktur serikat di Bekasi telah menjadi kekuatan politik mandiri yang mampu menopang kegiatan elektoral tanpa bergantung penuh pada sumber eksternal. Di sisi lain, bentuk dukungan dari masing-masing PUK dan bahkan kerelaan mereka untuk menyisihkan dana organisasi ke Partai Buruh dan

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

caleg dari perwakilan buruh membuktikan tingginya solidaritas antar buruh di Kabupaten Bekasi. Solidaritas yang telah terbentuk merupakan konsekuensi logis dari penggunaan aspek spasial perburuhan di Kabupaten Bekasi yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin.

c. Kemampuan Mobilisasi Politik

Dalam konteks Pemilu 2024, beberapa serikat buruh di Kabupaten Bekasi mencalonkan kader-kader mereka sebagai caleg melalui Partai Buruh. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, gerakan buruh melakukan serangkaian aksi langkah mobilisasi buruh untuk memilih caleg dari Partai Buruh. Adapun program strategi mobilisasi yang dilakukan oleh gerakan buruh di Kabupaten Bekasi antara lain; Salam Satu Pabrik (Sasapa) dan Salam satu Pintu (Sasatu). Sasapa bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada buruh di pabrik yang biasanya dilakukan saat jam pulang kerja melalui pembagian selebaran, pamflet, dan berupakan ajakan untuk memilih kader serikat buruh dan Partai Buruh pada saat Pemilu. Sekretraris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Bekasi dalam sebuah wawancara di media online mengungkapkan, bahwa melalui langkah Sasapa ini diharapkan informasi mengenai Partai Buruh benar-benar sampai di setiap anggota serikat yang ada di pabrik-pabrik (koranperdjoeangan.com, 2023).

Pada mobilisasi buruh di tingkat pabrik, PUK juga mempunyai peranan penting untuk membantu menyukseskan program Sasapa. Dalam hal ini, PUK tidak hanya menggerakkan anggota untuk memilih Partai Buruh, tetapi juga membangun kesadaran politik bagi buruh-buruh di pabrik tentang pentingnya representasi politik dalam memperjuangkan kepentingan kelas pekerja dalam ranah kekuasaan politik. Program Sasapa ini dilakukan dengan cara membagikan pamflet-pamflet kampanye politik Partai Buruh kepada buruh-buruh saat mereka pulang dari pekerjaan di pabrik. “Sasapa... yaitu ngasihkan pamflet-pamflet, tujuan-tujuan, visi-misi segala macam lah perjuangan Partai Buruh”, ujar Yayat Hidayat (Ketua PUK PT. Patec, wawancara 29/09/2025).

Program Sasapa yang dilakukan oleh serikat buruh di Kabupaten Bekasi ini merupakan bentuk dari spatial praxis buruh dalam perspektif geografi tenaga kerja. Hal tersebut didasarkan pada adanya upaya dari buruh di Kabupaten Bekasi untuk merebut kembali ruang produksi untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi mereka. Program Sasapa ini menunjukkan bahwa pabrik sebagai ruang ekonomi menjadi tempat di mana buruh memproduksi ulang ruang sosial dan politiknya. Dalam hal ini ruang produksi juga berfungsi sebagai ruang politik bagi buruh, tempat berlangsungnya proses sosialisasi dan mobilisasi politik.

Selain Sasapa, program Salam Satu Pintu (Sasatu) juga menjadi inovasi penting yang dijalankan oleh pengurus exco kecamatan Partai Buruh. Sasatu

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

dilakukan melalui pendekatan door to door ke perumahan warga, baik warga yang berprofesi sebagai buruh maupun non-buruh. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan calon legislatif dari Partai Buruh, mengumpulkan data dukungan, dan memperluas jaringan konstituen. "Kalau Sasatu, kan masyarakat umum kita juga terjaring... kita harus menjaring masyarakat (umum) juga. Kalau kita cuma ngandelin dari buruh aja ya agak berat suara kita", ungkap Surohman (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Buruh, wawancara 29/09/2025). Program ini memperlihatkan perluasan jangkauan politik buruh dari ruang industrial menuju ruang sosial perumahan dan komunitas warga di Kabupaten Bekasi.

Program Sasatu ini mencerminkan adanya pergeseran spasial perjuangan buruh di Bekasi yang awalnya merupakan perjuangan ekonomi yang sebelumnya berpusat di pabrik menjadi bentuk perjuangan ke ruang sosial yang lebih luas. Perjuangan buruh pada dasarnya melampaui batas-batas institusi ekonomi, perjuangan buruh mengakar dalam kehidupan masyarakat (Tufts & Savage, 2009). Dengan hadirnya kelompok buruh di perumahan masyarakat melalui program Sasapa, menjadi bukti bahwa gerakan buruh telah membangun sebuah ruang politik baru yang tidak lagi terbatas pada ruang pabrik. Gerakan buruh mulai melakukan ekspansi ke ruang yang lebih luas dan membangun citra baru bahwa gerakan politik buruh bukan hanya bersandar pada kepentingan buruh semata, melainkan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, strategi Sasapa dan Sasatu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kampanye, tetapi juga mencerminkan bagaimana ruang geografis industri dan pemukiman buruh di Bekasi menjadi arena politik baru yang memfasilitasi mobilisasi politik buruh. Melalui dua strategi ini, buruh berhasil mentransformasi ruang sosial mereka menjadi arena perjuangan politik yang aktif dan dinamis. Buruh melalui praktik sosial dan politik yang tertanam dalam ruang tempat mereka bekerja membuat geografi mereka sendiri (Herod, 1997). Melalui program Sasapa, buruh berupaya merebut kembali ruang produksi sebagai sumber kekuatan kolektif mereka. Sedangkan melalui program Sasatu buruh memperluas ruang yang mereka miliki. Kedua program ini menunjukkan bagaimana buruh di Bekasi menjadi aktor aktif dalam membentuk lanskap politik yang merepresentasikan kepentingan kelasnya sendiri.

Kelompok buruh di Kabupaten Bekasi memanfaatkan aspek spasial yang dimiliki untuk menghimpun kekuatan dan melakukan konsolidasi politik. Melalui serangkaian progam konsolidasi yang dilakukan oleh gerakan buruh selama masa Pemilu 2024, akhirnya gerakan buruh di Kabupaten Bekasi berhasil menempatkan dua kader dari FSPMI sebagai anggota parlemen daerah. Dua kader FSPMI tersebut ialah Surohman dan Ali Nur Hamzah. Kedua kader FSPMI ini mencalonkan diri melalui Partai Buruh.

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

4. Tantangan Konsolidasi Politik Buruh di Kabupaten Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilu 2024

Meskipun menunjukkan kemajuan signifikan, konsolidasi politik gerakan buruh di Kabupaten Bekasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Pertama, banyak buruh yang bekerja dan menetap di Bekasi belum terdaftar sebagai penduduk setempat sehingga tidak memiliki hak pilih dalam pemilu daerah. Kondisi ini mengakibatkan basis suara Partai Buruh tidak sepenuhnya termobilisasi, meskipun jumlah buruh di wilayah ini sangat besar. Banyak dari anggota serikat buruh tidak tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bekasi, melainkan mereka masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah masing-masing (Savirani, 2022). Adanya permasalahan administratif ini menyebabkan suara yang diberikan oleh anggota serikat buruh kepada Partai Buruh masih kurang efektif. *"Kita juga masih menemukan banyak anggota serikat pekerja/serikat buruh yang KTP-nya itu masih luar Bekasi",* ungkap Guntoro (Sekretaris Exco Partai Buruh Kabupaten Bekasi, wawancara 1/10/2025).

Kedua, tidak semua serikat buruh memiliki pandangan politik yang sama. Sebagian organisasi, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menolak keterlibatan dalam politik praktis dan memilih fokus pada isu ketenagakerjaan. Perbedaan ideologis ini menimbulkan fragmentasi gerakan dan melemahkan solidaritas politik buruh secara keseluruhan. Ketiga, keterbatasan finansial menjadi kendala serius. Sistem pemilu yang berbiaya tinggi menempatkan aktivis buruh pada posisi sulit karena minimnya sumber dana, sementara sebagian besar pemilih masih menunjukkan kecenderungan pragmatis dan terpengaruh praktik politik uang. *"Kalau bahasa sini itu ayam meren gitu... maksudnya money politics gitu lah. Itu budaya... itu susah dihilangkan",* ujar Binantara (Ketua Exco Partai Buruh Kecamatan Cibarusa, wawancara 27/09/2025). Meskipun PUK berkontribusi secara finansial melalui dana iuran anggota, jumlah dana yang diterima tersebut belum memadai untuk menutupi biaya kampanye yang besar.

Dinamika gerakan buruh di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa ruang tidak sekadar menjadi latar aktivitas ekonomi, tetapi juga arena politik yang dibentuk oleh tindakan kolektif buruh. Melalui perangkat seperti PUK dan strategi mobilisasi seperti Sasapa dan Sasatu, buruh berhasil mengartikulasikan kekuatan politiknya dalam konteks ruang industri dan sosial. Dengan kata lain, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan *labor geography* buruh bukanlah aktor pasif yang dikondisikan oleh struktur kapitalisme, melainkan agen yang secara aktif menciptakan, memodifikasi, dan memaknai ruang. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh serikat buruh di Kabupaten Bekasi menunjukkan bagaimana mereka

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

memanfaatkan aspek spasial dan lanskap politik yang dimiliki untuk membangun solidaritas sesama buruh yang bertujuan untuk konsolidasi politik buruh pada pemilu 2024.

KESIMPULAN

Gerakan politik buruh di Kabupaten Bekasi telah berhasil menggunakan aspek spasial buruh dan lanskap politik yang telah terbentuk sedemikian rupa untuk menyukseskan agenda konsolidasi politik buruh pada Pemilu 2024. Temuan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa konsentrasi kawasan industri dan pemukiman buruh yang merupakan desain dari ekonomi kapitalisme telah membentuk aspek spasial perburuhan dan lanskap politik di daerah ini. Meskipun demikian, hal tersebut tidak semata-mata terjadi begitu saja tanpa peran aktif dari buruh yang menetap di sana. Dalam hal ini buruh merupakan aktor aktif yang membentuk lanskap politik dan berperan juga sebagai aktor geografis yang memberikan pemaknaan terhadap ruang di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menjadi bukti konkret dari agenda-agenda gerakan yang dilakukan oleh buruh di Bekasi seperti demonstrasi, grebek pabrik, mogok, dan lain sebagainya hingga arah perjuangan politik buruh yang saat ini menapaki arena politik elektoral. Dengan kata lain, gerakan politik buruh di Kabupaten Bekasi telah bertransformasi dari arena politik jalanan ke arena politik elektoral.

Terbentuknya lanskap sosial-politik perburuhan di Kabupaten Bekasi ini juga menunjukkan signifikansi nilai tawar gerakan buruh di daerah tersebut. Kemampuan buruh dalam membentuk lanskap politik perburuhan berimplikasi terhadap adanya keseimbangan kekuatan politik di Kabupaten Bekasi. Kekuatan politik yang dimiliki oleh gerakan buruh menjadikan agenda-agenda yang berkaitan dengan isu perburuhan dapat diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan publik. Selain itu, dengan adanya representasi politik buruh di parlemen daerah membuat kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dapat dimanifestasikan sesuai dengan kepentingan buruh di Kabupaten Bekasi. Secara umum, ruang menjadi arena penting bagi pertentangan antara pemilik modal, buruh, dan negara. Adanya buruh di dalam dialektika perebutan ruang ini dapat menciptakan keseimbangan dalam lanskap politik perburuhan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa geografi tenaga kerja memiliki kontribusi untuk memengaruhi perilaku politik buruh di suatu daerah, terutama yang berkaitan dengan ranah politik elektoral. Implikasi tersebut tercermin dari aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan buruh di Kabupaten Bekasi dan dukungan mereka terhadap Partai Buruh pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menguji kembali temuan studi ini dengan melakukan penelitian di daerah-daerah lain dan melakukan perbandingan antar daerah industri. Selain itu, penting kiranya

untuk menelaah kembali pengaruh fragmentasi gerakan buruh terhadap agenda konsolidasi politik buruh di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Jawa Barat. (2024, November 28). *Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Kab/kota (Jiwa), 2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTUjMg==/jumlah-tenaga-kerja-industri-besar-sedang-kab-kota.html

Caraway, T. L., Ford, M., & Nugroho, H. (2015). Translating membership into power at the ballot box? Trade union candidates and worker voting patterns in Indonesia's national elections. *Democratization*, *22*(7), 1296–1316. https://doi.org/10.1080/13510347.2014.930130

Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Herod, A. (1997). From a Geography of Labor to a Labor Geography: Labor's Spatial Fix and theGeography of Capitalism. *Antipode*, *29*(1), 1–31. https://doi.org/10.1111/1467-8330.00033

Herod, A. (2001). *Labor Geographies: Workers and the Landscapes of Capitalism*. The Guilford Press.

Herod, A. (2003). Workers, Space, and Labor Geography. *International Labor and Working-Class History*, *64*, 112–138. https://doi.org/DOI: 10.1017/S014754790300022X

Herod, A. (2020). Labor Unionism. In *International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 71–76). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10101-5

Herod, A. (2023). Understanding the global political economy of work: insights from labor geography. In *Handbook of Research on the Global Political Economy of Work* (pp. 232–240). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781839106583.00029

Irawati, M., Cairns, S., & Suryadjaja, R. (2016). The Livelihood Impacts of the Large-scale Industrial Estate in Emerging Peri-urban of Jakarta. *LANDAC International Conference*, 12–13.

Iskandar, E. (2023, August 24). *Jejak Sejarah Berkembangnya Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi*. Radarbekasi.Id. https://radarbekasi.id/2023/08/24/jejak-sejarah-berkembangnya-kawasan-industri-di-kabupaten-bekasi/

Juliawan, B. H. (2011). Street-level Politics: Labour Protests in Post-authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, *41*(3), 349–370. https://doi.org/10.1080/00472336.2011.582706

koranperdjoeangan.com. (2023, October 20). *Salam Satu Pabrik Partai Buruh Dapat Respon Positif Beberapa Pimpinan Perusahaan*. Koran Perdjoengan. https://www.koranperdjoeangan.com/salam-satu-pabrik-partai-buruh-dapat-respon-positif-beberapa-pimpinan-perusahaan/

Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Basil Blackwell Ltd.

Lowndes, V., Marsh, D., & Stoker, G. (2017). *Theory and methods in political science*. Bloomsbury Publishing.

Mauritz O. Pangkerego, Y. (2013). *Inkulturasi Arsitektur Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, Yogyakarta: Etnografi Penciptaan Bangunan Suci* [Skripsi]. Universitas Indonesia.

Mufakhir, A. (2014). "Grebek Pabrik" in Bekasi: Research Note on Unions' Mobilisation Strategy. In J. Suryomenggolo (Ed.), *Worker Activism after Reformasi 1998 A New Phase for Indonesian Unions?* (pp. 93–114). Asia Monitor Resource Centre.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.

Randi, A., & Prayogi, A. (2022). Simbol Palu dan Eksistensinya dalam Politik Praktis Indonesia Tahun 1955. *Journal of Education and Culture*, *2*(3), 19–29.

Rohmah, I. (2018). *Sejarah Perkembangan Kota Bekasi Tahun 1950-2000* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati]. https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/12365

Savirani, A. (2022). 7. Unions and Elections: The Case of the Metal Workers Union in Elections in Bekasi, West Java. In *The Jokowi-Prabowo Elections 2.0* (pp. 127–144). ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore. https://doi.org/10.1355/9789815011371-010

SPSI Bekasi. (2025, September 25). *Unjuk Rasa Ribuan Buruh Bekasi, Ini Daftar Tuntutan yang Disuarakan*. SPSI Bekasi. https://spsibekasi.org/2025/09/25/unjuk-rasa-ribuan-buruh-bekasi-ini-daftar-tuntutan-yang-disuarakan/

Sugianto, D. (2025, September 18). *Bekasi Pemasok Lahan Industri Terbesar di RI, Terbaru Industrian Hub 10,5 Ha*. Detik.Com. https://www.detik.com/properti/berita/d-8118352/bekasi-pemasok-lahan-industri-terbesar-di-ri-terbaru-industrial-hub-10-5-ha

Sulaeman, S., Nuraini, Y., & Bandarsyah, D. (2024). Penanaman Modal Asing dan Dampak Industrialisasi di Cikarang tahun 1974-1998. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, *7*(1), 61–70.

JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik
Volume 5 Nomor 2, Desember 2025 Page : 1-20
ISSN : 2798-5024
e-ISSN : 2798-4613
DOI : 10.51622

Suryomenggolo, J. (2018). The making of a new social contract: Labor law in Indonesia after Reformasi. *Korea Open Access Journals*, *28*(2).

Tufts, S., & Savage, L. (2009). Labouring geography: Negotiating scales, strategies and future directions. *Geoforum*, *40*(6), 945–948. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.10.006

Winters, J. A., Manning, C., Pincus, J., & Hodiz, V. R. (2000). The Political Economy of Labor in Indonesia. *Indonesia*, *70*, 139. https://doi.org/10.2307/3351500